

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
YANG BERBEDA TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
SENJATA API TANPA HAK**

**(Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl dan Putusan Nomor
45/Pid.Sus/2021/PN Srl)**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H
Efren Nova, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg :07/PK-IV/V/2024

ABSTRAK

Secara normatif, kepemilikan senjata api tanpa hak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disertai ancaman pidananya. Meskipun telah diatur namun seringkali ditemukan adanya penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim, seperti pada Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN.Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/45/2021/ PN.Srl. Kedua putusan ini sama-sama melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa hak. Pada Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN.Srl dijatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan sementara Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Srl pidana penjara 3 tahun. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini, diantaranya: 1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana yang Berbeda terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak (Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN.Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.sus/2021/PN.Srl)? 2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak (Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN.Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.sus/2021/PN.Srl)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kedua putusan didasarkan oleh pertimbangan yuridis dan non yuridis (aspek filosofis dan sosiologis). Kemudian dari penerapan sanksi pidana pada kedua putusan terlihat adanya perbedaan sanksi pidana antara terdakwa Andi Susanto dan Renaldi dikarenakan norma hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* merupakan ketentuan hukum yang multi interpretasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menimbulkan persoalan di dalam penerapannya terutama dalam penjatuhan pidana oleh hakim.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak*

